



PERUBAHAN

RENSTRA TAHUN 2019-2023

BALITBANGDA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional serta perkembangan aktual dari isu-isu strategis di daerah.

Adanya penetapan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur, terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, hingga telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan *omnibus law*, tentunya akan banyak berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Kaltim kedepan.

Nantinya, Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang telah memuat perubahan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan perbaikan anggaran tahun 2021-2023 ini, menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Balitbangda dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis.

Informasi yang disajikan dalam Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perencanaan serta upaya pencapaian kinerja kelitbang hingga akhir periode RPJMD.

Samarinda, Juli 2022

Plt. Kepala

Sekretaris,



Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197311272006041009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA PROV. KALTIM	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	72
3.2 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi	84
3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	85
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	89
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	92
4.2 Sasaran.....	93
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan	119

BAB VI	Rencana program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	122
6.2	Pendanaan Indikatif	129
BAB VII	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	177
BAB VIII	PENUTUP	186





1.1. Latar Belakang

Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah memasuki tahun ke empat pelaksanaan, Renja Tahun 2019, Renja Tahun 2020, Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 (tahun berjalan). Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kelitbang sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang kelitbang, serta mendukung sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, **“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”**.

Selaras dengan perubahan beberapa kebijakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 serta mengakomodir dinamika yang terjadi, dipandang penting untuk melakukan perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Hal utama perubahan yang mendasari perubahan Renstra yakni perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya. Sehingga tahun 2021 Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur melakukan perubahan atau perbaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang dimaksudkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Hal mendasar lainnya yakni hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kelitbang yang dianggap perlu untuk memperbaiki sasaran dan indikatornya yang disesuaikan dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebelum Perda Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, maka Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen Perubahan Renstra. ,

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
19. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan selama periode tahun 2019-2023 yaitu:

1. Sebagai dokumen Rencana Strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan dari Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah:



1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2019-2023.
2. Memberikan arahan bagi seluruh staf/pegawai Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan/melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2019-2023.
3. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja organisasi serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan organisasi yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
4. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.
6. Menyelaraskan program dan kegiatan Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kelitbangan dengan kabupaten dan kota.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka perlu dilakukan juga **perubahan terhadap Renstra Balitbangda.**

Kebijakan lainnya yang mendukung terhadap perubahan Renstra yakni terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, sehingga penting untuk menyelaraskan program kelitbangan dan penunjang dengan peraturan tersebut.

Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertajam indikator kinerja beserta target kinerja kelitbangan, agar hasil kelitbangan lebih terukur, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai SAKIP Balitbangda.



1.4. Sistematika

Rencana Strategis Balitbangda ini terdiri atas delapan bab, sistematika penulisannya dapat disajikan seperti berikut ini.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya memuat sumberdaya organisasi, kondisi capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Komponen Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan badan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat startegi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



BAB VII Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan serta sebagai alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Balitbangda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

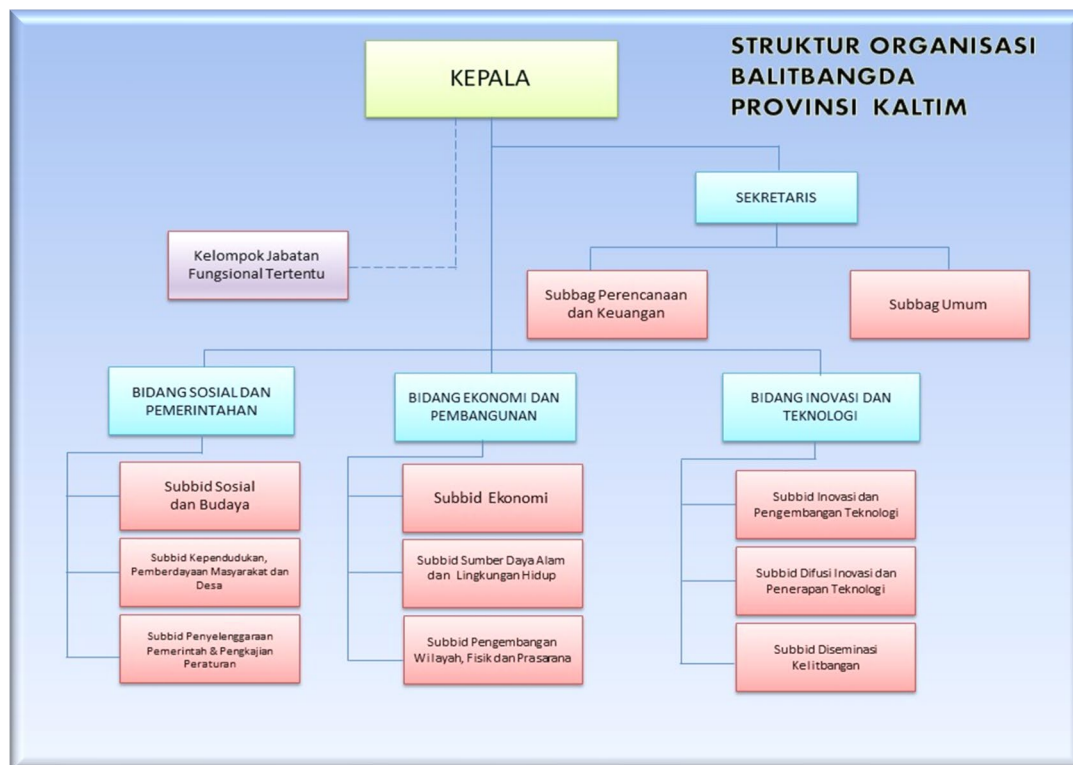
BAB VIII Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat harapan dan komitmen terhadap Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang serta Rumpun Jabatan Fungsional Peneliti. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat dikemukakan seperti berikut ini.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas : membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

1. **Sekretariat Badan** dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

- Subbagian perencanaan program dan keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- Subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2. **Bidang Sosial dan Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi subidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada bidang sosial dan pemerintahan.

- Subbidang sosial dan budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan sosial dan budaya.
- Subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

3. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;

- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada bidang ekonomi dan pembangunan.

- Subbidang ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian ekonomi.
- Subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian penelitian dalam pengembangan sumber daya alam;
- Subbidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian penelitian dalam pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.

4. **Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Inovasi dan Teknologi membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi..

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbangan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada bidang inovasi dan teknologi.

- Subbidang inovasi dan pengembangan teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap inovasi dan pengembangan teknologi.
- Subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- Subbidang diseminasi kelitbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,

pengaturan teknis dan pengendalian terhadap diseminasi kelitbang.

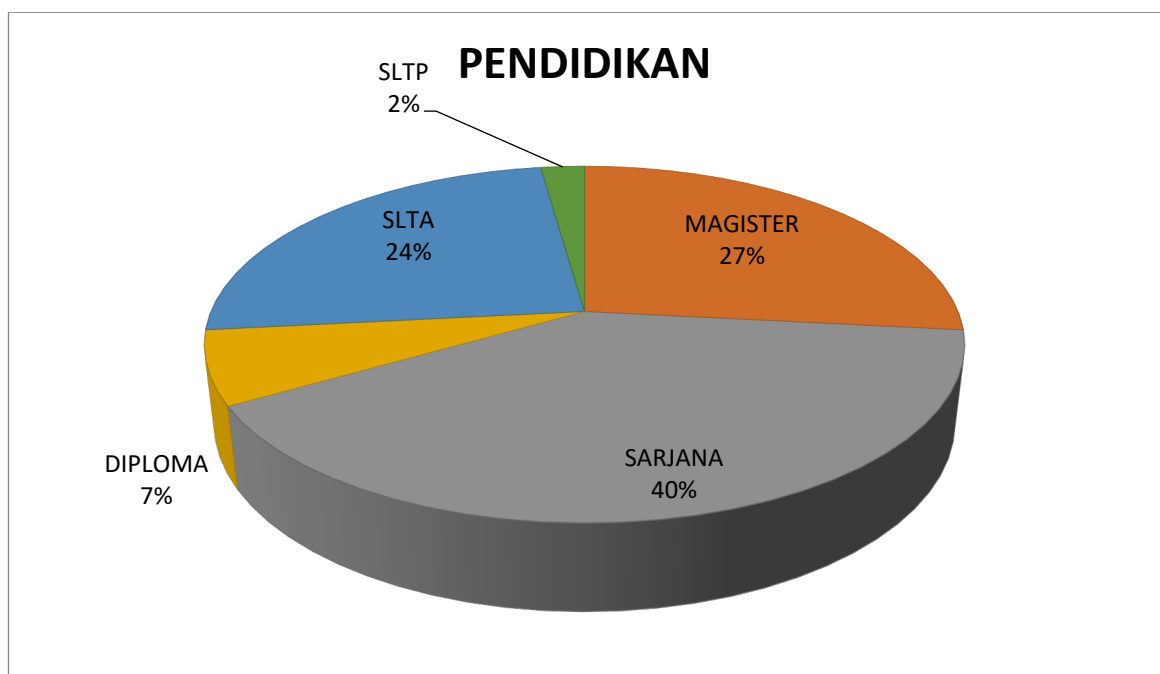
5. Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Peneliti (JFP)

Jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Balitbangda sesuai peraturan ketentuan

2.2. Sumber Daya

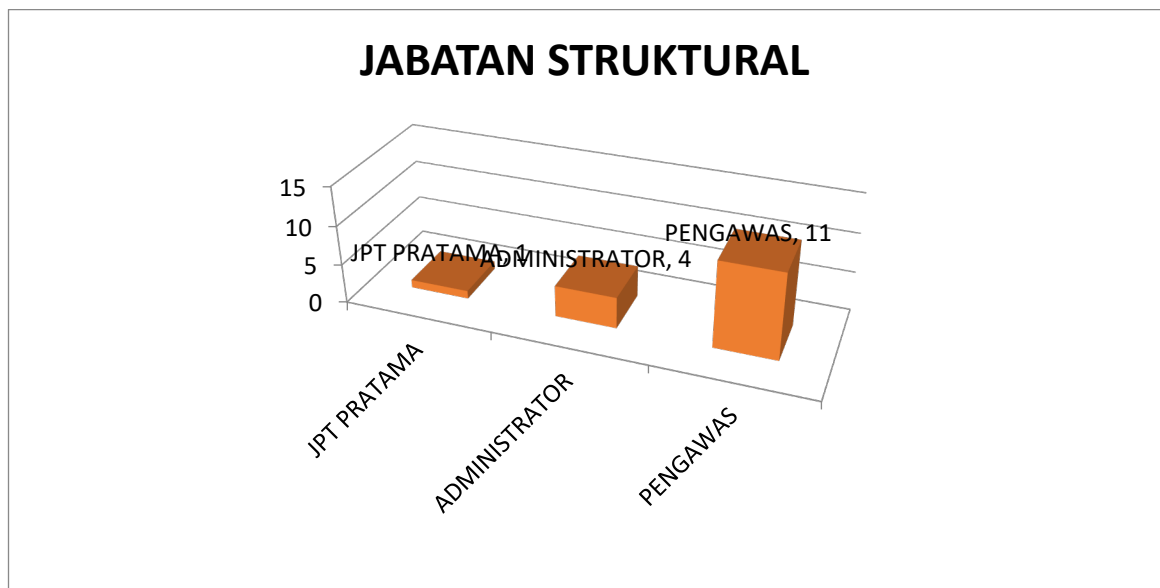
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 45 orang yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar 2.2. sebagai berikut :



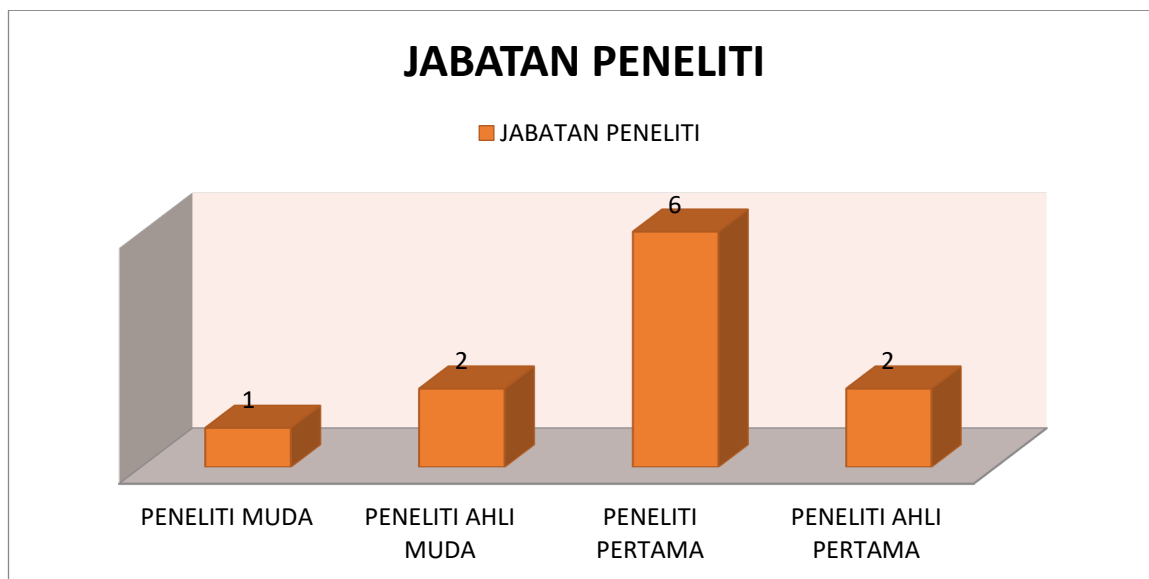
Gambar 2.2 Tingkat Pendidikan ASN Balitbangda Kaltim Tahun 2021

Adapun SDM Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 2.3 Jabatan Struktural Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021

Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 2.4 Jabatan Fungsional Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021

Keahlian/kepakaran dari pejabat fungsional peneliti tersebut meliputi :

No.	Nama	Jabatan	Kepakaran
I. Bidang Ilmu Teknik			
1.	Dr. Ari Sasmoko Adi, ST.,M.T.	Peneliti Muda/IIId	Teknik Transportasi Jalan
2.	Puput Wahyu Budiman, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Perencanaan Wilayah
3.	Zhikry Fitriani, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Manajemen Industri
4.	Suharsono, ST	Peneliti Pertama/IIIa	Teknik Lingkungan
II. Bidang Ilmu Alam			
1.	Hj. Eka Nor Santi, SP, MP	Peneliti Muda/IIId	Sistem Usaha Pertanian
2.	Noor Wahyuningsih, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Kebijakan Publik
3.	Mardiany, S. Hut, M.Si	Peneliti Pertama/IIIa	Kebijakan Publik
III. Bidang Ilmu Sosial			
1.	Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	Peneliti Muda/IIId	Kebijakan Ekonomi
2.	Adi Hendro Purnomo, S.IP, MAP	Peneliti Muda/IIId	Administrasi Publik
3.	Ratih Fenty Anggriani Bintoro, SAP, MAP	Peneliti Pertama/IIIa	Kebijakan Publik
4.	Yuli Fitrianto, S.Sos, MAP	Peneliti Pertama/IIIa	Politik dan Pemerintahan
5.	Pebiansyah Hapsari, SH, MH	Peneliti Pertama/IIIa	Hukum Tata Negara

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 45 orang dengan komposisi pangkat dan golongan/ruang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pangkat dan Golongan/Ruang PNS dan
Tenaga Teknis/Non Teknis Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina Utama Muda	IV/d	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	4
3	Pembina	IV/a	3
4	Penata Tingkat I	III/d	8
5	Penata	III/c	4
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	11
7	Penata	III/a	1
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	10
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
11	Juru Tingkat I	I/d	1
J u m l a h			45
11	Tenaga Teknis/Non Teknis		38

2.2.2 Asset/Modal

Tabel 2.2
Jumlah Aset/Modal Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021

ASET MODAL	
Tanah	0.00
Peralatan dan Mesin	0.00
Gedung dan Bangunan	24,900,000.00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
JUMLAH ASET TETAP	24,900,000.00

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit usaha yang ada untuk menunjang fungsi Badan litbang adalah sebagai berikut :

- Bangunan kantor Balitbangda
- Ruang seminar, diskusi, persentasi dan lain-lain dilengkapi *meubelair* dan *Audio Visual System*
- Ruang rapat staf lengkap dengan *meubelair*
- Ruang Perpustakaan
- Ruang Peneliti
- Ruang Diseminasi Kelitbangan
- Ruang Satpam
- Jaringan Internet
- Gudang
- Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
- Notebook, PC dan Printer
- Sarana Dokumentasi
- Televisi.
- Layar persentasi/LC
- Sarana/prasarana lainnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan penelitian

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah; peran Balitbangda semakin penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Tahun 2021 Balitbangda telah melakukan 3 (tiga) kegiatan yang berperan penting dalam penilaian keberhasilan pembangunan serta inovasi daerah yakni :

1. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
3. Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN PEDANA).
4. Pelaksanaan Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN).

Progress Pelaksanaan Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN) Tahun 2021

no	Uraian	Keterangan
1.	Studi Kelayakan Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN)	
	• Penyusunan Studi Kelayakan	sedang dilaksanakan konsultan
	• Pembentukan Tim Pendukung Studi Kelayakan	dalam proses
2.	Penyiapan areal ISRAN	
	• Pembersihan awal areal batas	telah dilaksanakan
	• Pemasangan patok dan tali batas	telah dilaksanakan
	• Pembangunan infrastruktur dasar	sedang dilaksanakan
	• Pengadaan bibit pohon endemik Kaltim	telah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
	• Groundbreaking pembangunan	groundbreaking oleh Gubernur Kaltim
3.	Proses Administrasi	
	• Penyiapan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi	telah terbit
	• Penyampaian proposal Pembangunan Science Center Kalimantan Timur/ Innovative Science and Research Area Network (ISRAN)	telah dilaksanakan kepada PP IPtek, BPP Kemendagri, BRIN dan pihak terkait lainnya

Pada tahun 2021 Balitbangda melakukan perubahan indikator kinerja utama yang tujuannya mendukung tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur serta dalam rangka memperbaiki nilai SAKIP Balitbangda.

Artinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berusaha memperbaiki kinerja kelitbang agar target Indikato Kinerja Utama yang

tercantum pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Badan tercapai. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan Perubahan Renstra periode 2019-2023 sekarang ini.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja melalui perbandingan antara rencana kerja dengan pencapaian realisasi. Pengukuran capaian kinerja ini dapat terlihat pada sebelum dan sesudah perubahan, tahun 2020 (sebelum) dan tahun 2021 (sesudah).

Adapun hasil pengukuran kinerja kegiatan dengan nilai capaian untuk setiap indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	30	I			
					II			
					III			
					IV	30	22	73
2.	Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) secara konsisten	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	30	I			
					II			
					III			
					IV	30	22	73
		Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan di daerah	%	30	I			
					II			
					III			
					IV	-	-	-

Indikator pada tahun 2020 tersebut mendukung pada penerapan dan pemanfaatan kelitbangan dalam menerapkan inovasi daerah.

Setelah melalui tahapan evaluasi serta beberapa perubahan kebijakan serta dalam rangka mendukung Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka indikator kinerja utama tahun 2021 kembali disesuaikan dengan sasaran utama kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Tabel 2.4 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	%	45	I			
					II			
					III			
					IV	45	45	100
2	Meningkatnya Hasil penelitian yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara	Persentase Hasil Kelitbangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN	%	27	I			
					II			
					III			
					IV	27	27	100

Dalam rangka mendukung perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi keselarasan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah termasuk Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Adapun hasil keselarasan tujuan, sasaran dan indikator tersebut mulai diberlakukan padatahun 2022, seperti tampak pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Provinsi Kaltim Tahun 2021-2023
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja kelitbangan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pmeangunan Ibu Kota Negara/IKN	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pmeangunan Ibu Kota Negara/IKN	Indikator lama	Indikator lama	43%	72%	100%

Sumber : Hasil verifikasi keselarasan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, realisasi kinerja dan hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2019-2020 juga dapat dilihat dari trend peningkatan pembiayaan pembangunan bidang Litbang di Kalimantan Timur yang, pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2019-2020 yang hampir semua 100% serta kondisi umum bidang Litbang di Kalimantan Timur tahun 2019 yang berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020 terlihat pada tabel 2.6 berikut :



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/2019	(7)/2020	(8)/2021	(9)/2022	(10)/2023	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan				70%	80%	90%	95%	100%	91%	80%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	130	100			
	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan				7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan				70%	80%	90%	95%	100%	70%	80%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100	100		
Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100	100		
Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100	100		
Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan				5 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	7 laporan	6 laporan	6 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	140	100			
Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi				70%	80%	90%	95%	100%	70%	80%	80%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan				1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100				



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang inovasi dan teknologi yang dilaksanakan				4 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Nilai akuntabilitas kinerja PD				78 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	56 (CC)	79 (BB)	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	72	76			
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan				23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran				15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu				2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	3 Unit	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana				8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Persentase ASN yang memiliki ASN standar kompetensi				80%	81 %	82%	83%	85%	80%	81 %	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi				77 Orang	130 Orang	155 Orang	180 orang	205 Orang	212 Orang	130 Orang	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	275	100			



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatannya Kualitas Sumber Daya Aparatur				10 Orang	11 Orang	12 Orang	13 Orang	13 Orang	1 orang	11 Orang	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal				80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan				80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan bulletin lembusuna				70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	70 artikel	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			
Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	Permendagri 90 Tahun 2019	100	100			

Indikator kinerja pada tabel di atas berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sedangkan tahun 2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



litbang.kaltimprov.go.id



balitbangdaprov.kaltim



Balitbangda Prov KT

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/2019	(7)/2020	(8)/2021	(9)/2022	(10)/2023	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2	2	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006		0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006				Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah rancang bangun yang diuji cobakan	Rancang bangun			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim	Inovasi			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Rakor Kelitbagan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah hasil kelitbagan yang di Diseminasikan	Diseminasi			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan	artikel			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	20	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	20			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah HKI yang difasilitasi	HKI			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Dokumen			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	31	31	31	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	31			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Laporan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	21	21	21	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	21			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10	10	10	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	14	14	14	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	14			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	14	14	14	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	14			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10	10	10	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Bulan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12	12	12	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12	12	12	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Jenis			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	27	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	27			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	8	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	8			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Jenis			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	27	12	12	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	27			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pegawai			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	358	329	329	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	358			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	56	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	56			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	3	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	3			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	16	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	16			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
jumlah mebelair yang diadakan	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	37	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	37			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Bulan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12	12	12	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Surat			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100	100	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Pelayanan Umum Yang Dilaksanakan	Layanan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	38	49	49	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	38			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, air, dan listrik	Bulan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12	12	12	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	Kegiatan			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	5	5	5	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	5			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25	27	27	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2	2	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	52	0	0	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	52			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
luas areal yang dilakukan pemeliharaan	M ²			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	7000	7000	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1	1	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1			Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100		



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Belanja	4.745.425.350,00	5.190.316.872,50	4,373,907,399	4.990.242.453,00	0,92	0,96	8,57	12,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.349.575.000,00	1.342.485.672,50	1,175,509,360	1.268.803.028,00	0,87	0,95	(0,53)	7,35
Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	1.349.575.000,00	1.342.485.672,50	1,175,509,360	1.268.803.028,00	0,87	0,95	(0,53)	7,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	511.450.000,00	847.281.000,00	401,650,000	799.236.203,00	0,79	0,94	39,64	49,75
Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	511.450.000,00	847.281.000,00	401,650,000	799.236.203,00	0,79	0,94	39,64	49,75

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.073.935.000,00	1.427.178.000,00	553,988,000	1.417.914.943,00	0,52	0,99	24,75	60,93
Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	986.485.000,00	1.282.678.000,00	553,988,000	1.273.594.943,00	0,56	0,99	23,09	56,50
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	87.450.000,00	144.500.000,00	0	144.320.000,00	0,00	1,00	39,48	100,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	174.620.000,00	25.500.000,00	25,500,000	24.817.400,00	0,15	0,97	(584,78)	(2,75)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	103.120.000,00	21.000.000,00	21,000,000	20.517.400,00	0,20	0,98	(391,05)	(2,35)



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	71.500.000,00	4.500.000,00	4,500,000	4.300.000,00	0,06	0,96	(1.488,89)	(4,65)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	129.420.000,00	210.460.000,00	59,550,000	206.157.500,00	0,46	0,98	38,51	71,11
Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan	42.550.000,00	85.075.000,00	59,550,000	84.575.000,00	1,40	0,99	49,99	29,59
Kegiatan Rakorda Kelitbangan	86.870.000,00	125.385.000,00	0	121.582.500,00	0,00	0,97	30,72	100,00
Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	435.447.350,00	421.545.000,00	220,245,000	409.553.979,00	0,51	0,97	(3,30)	46,22
Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	295.947.350,00	343.240.000,00	141,940,000	340.205.579,00	0,48	0,99	13,78	58,28



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan	139.500.000,00	78.305.000,00	78,305,000	69.348.400,00	0,56	0,89	(78,15)	(12,92)
Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	477.058.000,00	482.102.500,00	182,552,500	446.535.500,00	0,38	0,93	1,05	59,12
Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	331.515.000,00	445.405.500,00	142,860,500	410.001.600,00	0,43	0,92	25,57	65,16
Penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	145.543.000,00	36.697.000,00	39,692,000	36.533.900,00	0,27	1,00	(296,61)	(8,64)
Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	593.920.000,00	433.764.700,00	185,364,700	417.223.900,00	0,31	0,96	(36,92)	55,57
Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	483.920.000,00	387.764.700,00	139,364,700	375.911.500,00	0,29	0,97	(24,80)	62,93
Penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	110.000.000,00	46.000.000,00	46,000,000	41.312.400,00	0,42	0,90	(139,13)	(11,35)



Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	1	2		1	2	3	Anggaran 1	Anggaran 2	Realisasi 1
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total Belanja	19.558.892.000	19.000.000.000	20.000.000.000	9.297.969.400			47.5			(0.03)	5	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.439.615.000	1.500.000.000	3.585.750.154	2.986.630.139			86.8			(1.29)	59	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	867.075.500	340.400.000	400,000,000	783.918.864			90.3			(1.55)	15	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	263.100.000	159.600.000	100,000,000	250.866.610			95.4			(0.65)	(60)	

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	1	2		1	2	3	Anggaran 1	Anggaran 2	Realisasi 1
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	1.192.174.500	500.000.000	1,125,000,000	1.011.964.565			84.9			(1.38)	56	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.180.115.000	500.000.000	1,243,600,123	939.880.100			79.6			(1.36)	60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.743.027.000	17.500.000.000	16,414,249,846	4.673.135.724			29.7			0.10	(7)	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.950.000	42,800,000	46,360,000	38.950.000			49.3			(0.84)	8	
Administrasi Keuangan	11.038.257.632	12,121,189,430	11,229,045,172				0.0			0.09	(8)	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000		35,000,000	28.500.000			81.4				100	



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan		
	1	2	3	1	2		1	2	3	Anggaran 1	Anggaran 2	Realisasi 1
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.507.343.193	2,462,249,429	2,468,936,030	2.311.067.427			92.2			(0.02)	0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.452.500		312,364,500	258.549.500			83.3				100	
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.731.085.675	2,416,737,041	1,874,406,144	1.641.399.849			94.8			0.28	(29)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.138.000	457,024,100	448,138,000	264.545.114			75.3			0.23	(2)	



2.3.1 Kondisi Umum Wilayah Kerja Balitbangda

a. Gambaran Umum

Gambaran umum kondisi umum daerah adalah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi. Balitbangda provinsi Kalimantan Timur terletak pada kondisi geografi dengan titik koordinat sebagai berikut : 0°29'21"LS, 117°07'15"BT.

Secara administratif kecamatan samarinda ulu berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan kecamatan samarinda utara
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan kecamatan sungai pinang
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan kecamatan samarinda seberang
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan kecamatan sungai kunjang

Adapun kondisi demografi ditunjukkan dengan jumlah penduduk kecamatan samarinda ulu sebesar 125.553 jiwa pada tahun 2012, dengan kepadatan penduduk sebesar 5.675 jiwa per km².

b. Standar Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan aparatur pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat, Pelayanan yang dimaksud adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Informasi akan tingkat kepuasan masyarakat tersebut melalui data dan informasi tersebut dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 berada pada nilai 74,77. Hasil survey menunjukkan semua unsur pada range baik, yaitu unsur kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kewajaran biaya/tarif, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

c. Hubungan antar Lembaga

Guna meningkatkan pencapaian sasaran, Balitbangda Prov. Kaltim juga terlibat dalam kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Lembaga Litbang Kementerian/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian dan lain- lain yaitu:

Tabel 2.10
Kesepakatan dan Kerjasama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2017

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
1.	MoU :					
	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia	1 (Satu) Tahun, 28 April 2016 sd 28 April 2017	Kerjasama lingkup Litbang teknologi pertanian spesifik lokal berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balai Teknologi Pertanian Kaltim
	PKS :					
	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	7 (Tujuh) Bulan, 2 Mei 2016 sd 2 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data dan informasi kesesuaian beberapa jenis komoditas pertanian sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayah. - Menyusun peta perwilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agrikologi skala 1 : 50.000 di Kab. PPU, Samarinda , Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur. - Mengidentifikasi komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	Selesai : kerjasama ditindaklanjuti melalui kegiatan “Perwilayahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Pertanian Di Kalimantan Timur Tahun 2016”
2.	MoU :					

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017,	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
	PKS :					



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	Bertukar data dan informasi kelitbangan dan mengaplikasikan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk : - Sosialisasi perubahan nomenclatur pada OPD Balitbangda di Provinsi Kalimantan Timur. - Sosialisasi hasil-hasil Ristek Aplikatif yang berbasis komoditas - Sosialisasi komoditas jelai sebagai salah satu potensi sumber pangan yang dapat dibudidayakan di Kalimantan Timur. - Sosialisasi komoditas kakao sebagai bahan baku pembuatan coklat dan permen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani kakao. - Untuk PKS antara
	Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
						Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balitbangda Kab. Kutai Timur dalam proses menuju kerjasama tripartit.
3.	MoU :					
	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Dan Provinsi Kalimantan Utara	5 (lima) tahun, mulai 15 Desember 2014-15 Desember 2019	Pengembangan potensi kawasan di sekitar yang dilalui ALKI-II di bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi antara pihak kerjasama	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah
	PKS :					



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5 (lima) tahun , mulai 12 November 2016 sd 12 November 2021.	1. Kelitbangan dan inovasi pada 8 bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II 2. Kerjasama workshop/seminar dan kegiatan lainnya 3. Mengadakan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Sedang berjalan
4.	Fakultas Pertanian Universitas Mataram	3 (tiga) tahun mulai 24 Juli 2014 – 24 juli 2017	Bidang penelitian dan pengembangan ketahanan pangan, tanaman penghasil gaharu dan teknologi produksi gubal gaharu	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Kegiatan terlaksana dalam bentuk kegiatan pengembangan gaharu di Kalimantan Timur, namun rasionalisasi anggaran PKS tidak dapat dilanjutkan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALTIM

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
5.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	3 Tahun (2 Juni 2014 sd 2 Juni 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur jalan dan jembatan melalui pelatihan sumber daya manusia dan bentuk <i>in-house training</i> atau <i>on job training</i>. - Penelitian Bersama (<i>Joint Research</i>) - Tukar menukar informasi hasil litbang dan standarisasi konstruksi - Advis Teknik teknologi jalan dan jembatan - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan relevan lainnya di bidang jalan dan jembatan 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Jangka waktu MoU dengan Kementerian PU sudah berakhir pada tahun 2014, maka berdampak terhadap pelaksanaan PKS selanjutnya.	Sedang dalam proses perpanjangan MoU sehingga PKS dapat dilanjutkan kembali
6.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKS)	3 (Tiga) Tahun (24 Maret 2015 sd 24 Maret 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan sumber daya air melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk <i>in house training</i> dan <i>on job the -training</i>. - Penelitian Bersama (<i>Joint Research</i>) bidang sumber daya air. - Advis teknis dalam bidang sumber daya air. - Pelatihan dan praktek kerja 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)		



No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			penggunaan alat laboratorium bidang sumber daya air. - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan lainnya di bidang sumber daya air - Sharing data terkait bidang sumber daya air			
7.	Universitas Brawijaya Malang	1 (Satu) Tahun (21 Juni 2016 sd 21 Juni 2017)	Bidang pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan sosial budaya dan kepariwisataan	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Terkait rasionalisasi anggaran, kegiatan hanya dilanjutkan dengan menginisiasi perintah direktif Gubernur Kaltim mengenai persiapan relokasi binatang-binatang peliharaan PT. Gunung Bayan Kab. Kutai Barat ke Kaltim Zoo dengan bekerjasama dengan pihak Jatim Park.

**MoU /KESEPAKATAN BERSAMA dan PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

NO	JUDUL MoU	PIHAK KERJASAMA	JENIS KERJASAMA	MASA BERLAKU
KESEPAKATAN BERSAMA				
1	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Mulawarman	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan; b. Melakukan tukar menukar informasi Ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Melakukan pemagangan dan praktek kerja lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 30 November 2020 dan berakhir pada 30 November 2023
2	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Widyagama Mahakam Samarinda	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan; b. Melakukan tukar menukar informasi Ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Melakukan pemagangan dan praktek kerja lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 30 November 2020 dan berakhir pada 30 November 2023
3	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan; b. Melakukan tukar menukar informasi Ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Melakukan pemagangan dan praktek kerja	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 30 November 2020 dan berakhir pada 30 November 2023

			lapangan	
4	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Cipta Dharma	a. Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan daerah; b. Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 14 Juli 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2023
5	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	a. Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan daerah; b. Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 14 Juli 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2023
6	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT)	a. Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan daerah; b. Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 14 Juli 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2023
7	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Balikpapan	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan daerah; b. Tukar menukar	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2023

			informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Pemagangan dan praktek lapangan	
8	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Politeknik Negeri Samarinda	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan ; b. Melakukan Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Melakukan Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 dan berakhir pada 21 Desember 2023
9	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan ; b. Melakukan Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Melakukan Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2023
10	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Institut Teknologi Kalimantan	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan ; b. Melakukan Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Melakukan Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2023

11	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Kutai Kartanegara	a. Melakukan Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan ; b. Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 21 Desember 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2023
12	Kerjasama Tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	a. Bidang Pendidikan; . Bidang Penelitian; b. Bidang pengabdian Kepada Masyarakat;	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 12 November 2021 dan berakhir pada 12 Nopember 2023
13	Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Universitas Institusi Agama Islam Negeri Samarinda	a. Penelitian dan Pengembangan di berbagai aspek Pembangunan daerah; b. Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Pemagangan dan praktek lapangan	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 14 Juli 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2023
14	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	a. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan hortikultura b. Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi c. Pemagangan dan praktek lapangan	14 Juli 2021-31 Desember 2023

PERJANJIAN KERJASAMA				
15	Kerjasama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	(1)Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan intelektual; (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kekayaan Intelektual; (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual;	Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 23 September 2021 dan berakhir pada 23 September 2024

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menungghah kemampuan. Tantangan yang dihadapi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan aspek organisasi dan tata laksana, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, aspek pembiayaan dan aspek kerjasama, sehingga diperoleh tantangan pengembangan pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim sebagai berikut :

- **Aspek Organisasi dan Tata Laksana**, adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan organisasi yang ada di daerah, sehingga perlu penataan ulang maupun penyempurnaan struktur organisasi di daerah.

Tipologi organisasi Balitbangda Prov. Kaltim yang miskin struktur namun kaya fungsi dan tergolong dalam tipe “B”, saat ini perlu dilakukan peningkatan mengingat peran dan tugas Balitbangda yang semakin kompleks.

Selain itu, belum terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasinya program kelitbangan dengan perangkat daerah lainnya menjadi suatu kondisi yang mengakibatkan belum optimalnya pemaanfaatan hasil kelitbangan itu sendiri.

- **Aspek Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama bagi fungsional peneliti sebagai ujung tombak organisasi litbang. Namun kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat terbatas, sehingga perlu diatasi, yaitu antara lain dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh fasilitas pendidikan, baik pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknis maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek. Meningkatkan wawasan melalui seminar, diseminasi, workshop, lokakarya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, para ASN baik tingkat eselon maupun staf perlu diberikan pengetahuan dan kompetensi mengenai kelitbang semisal dalam hal pembuatan KAK/TOR, penyusunan proposal, dan sebagainya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**, salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas ruang perkantoran berikut fasilitas pendukungnya. Terutama laboratorium data/pusat data litbang yang belum ada, fasilitas perpustakaan yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta fasilitas teknologi informasi yang perlu dikembangkan. Hal ini harus menjadi perhatian guna menjamin kualitas hasil kelitbang.
- **Aspek Pembiayaan**, dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang aspek anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran yang dikelola masih terbatas dan bersumber pada APBD. Sedangkan dana-dana lainnya dari sumber yang sah dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sementara pembangunan dan pengembangan IPTEK di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit.
- **Aspek Kerjasama**, aspek kerjasama litbang akan dikembangkan bersama dengan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Pihak Swasta, dan untuk beberapa kementerian teknis terkait di pusat belum dilakukan secara optimal. Hal ini perlu dilakukan karena litbang di Perguruan Tinggi dan Kementrian/Lembaga di pusat memiliki SDM Peneliti yang berpengalaman

sesuai dengan keahliannya. Kemudian kerjasama dengan donor internasional masih belum dilakukan. Litbang masih terfokus pada kegiatan penelitian, pengembangan serta kajian yang dibiayai dari sumber dana APBD.

Peluang adalah suatu cara untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan. Selain itu peluang merupakan ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak bagi suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Ditinjau dari urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, Balitbangda Prov. Kaltim mempunyai peluang pengembangan pelayanan sebagai berikut :

- Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis, maksudnya memantapkan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu, yang artinya kegiatan kelitbangan hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Litbang Provinsi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelitbangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi terkait hal tersebut.
- Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat penting diterapkan dalam proses pembangunan dalam bentuk penguatan inovasi daerah.
- Hubungan jejaring antar institusi perguruan tinggi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat (ABGC/ Akademisi, Bisnis, *Government*, dan *Community*), maksudnya melalui jejaring tersebut akan mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan IPTEK.
- Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN PEDDA)
- Instansi kelitbangan mendapatkan penugasan dari Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

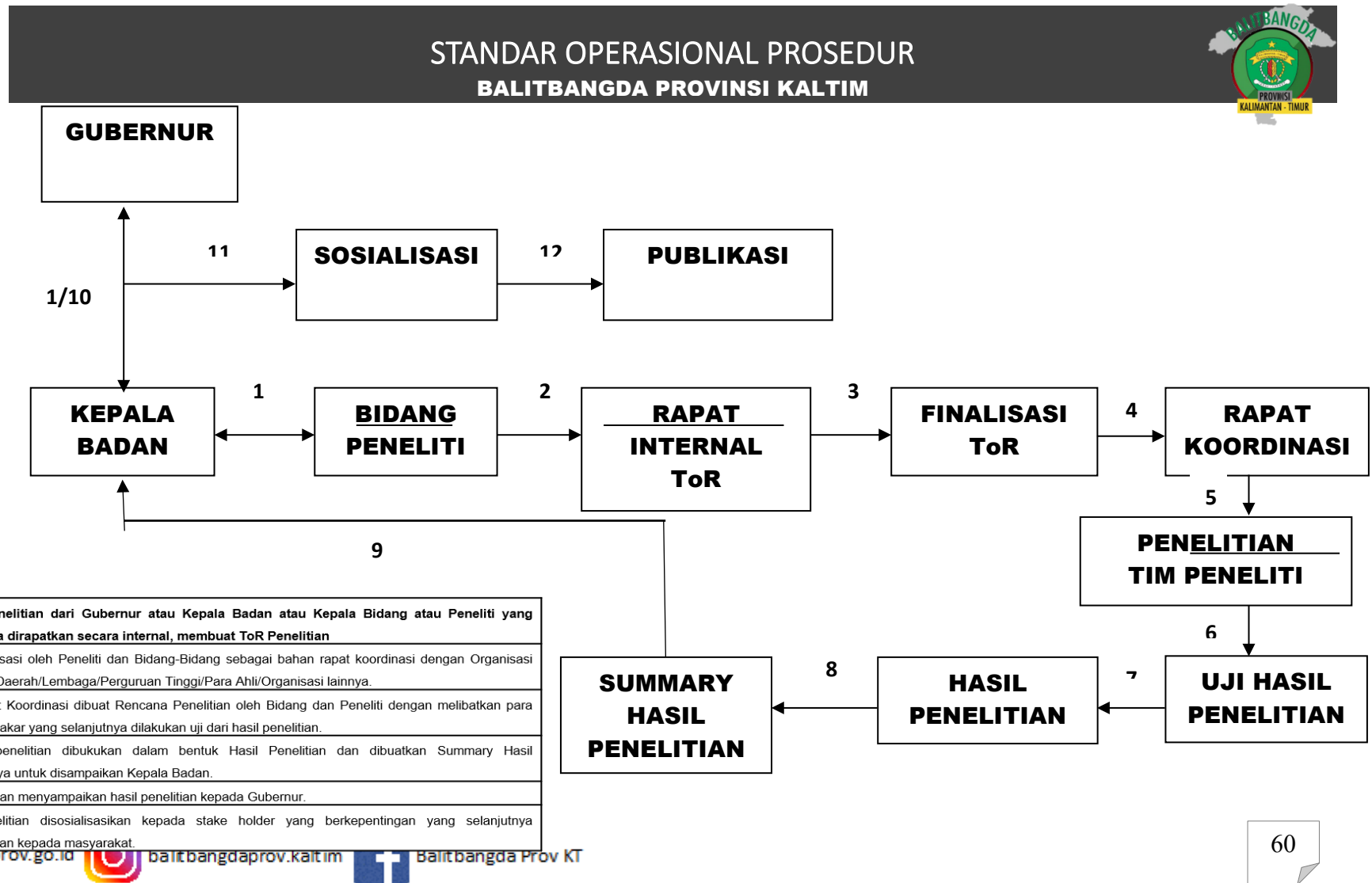
Melalui peluang-peluang tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga pada tahun 2021 melakukan beberapa pembenahan dalam rangka pelayanan publik dengan membuat beberapa standar pelayanan diantaranya sebagai berikut :



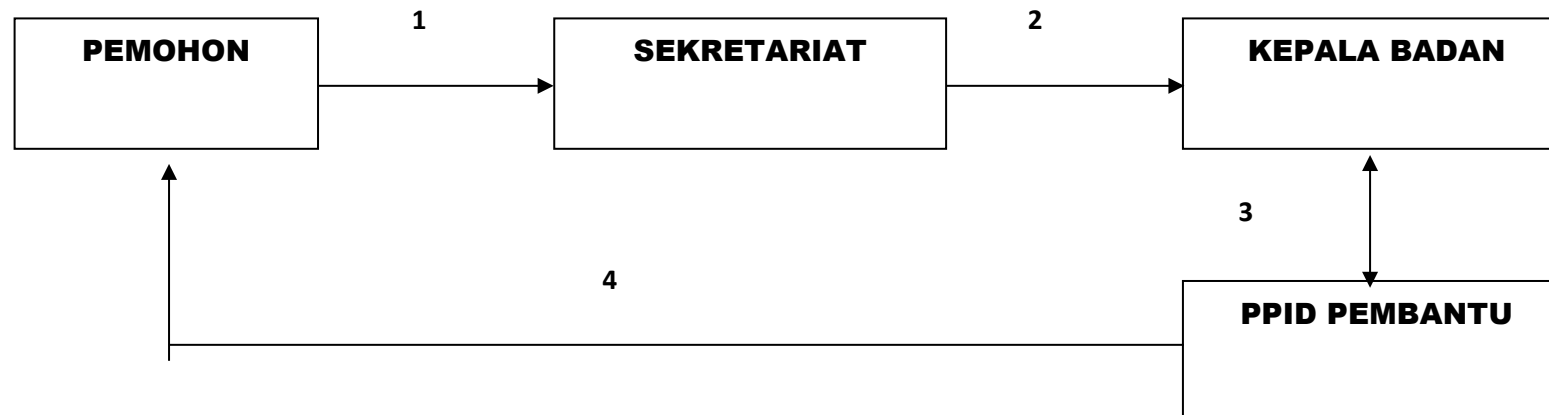
1. Standar Pelayanan Kelitbangan
2. Standar Operasional Prosedur
3. Standar Pelayanan Data dan Informasi
4. Peta Proses Bisnis



Alur Proses Layanan



**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI
BALITBANGDA PROVINSI KALTIM**

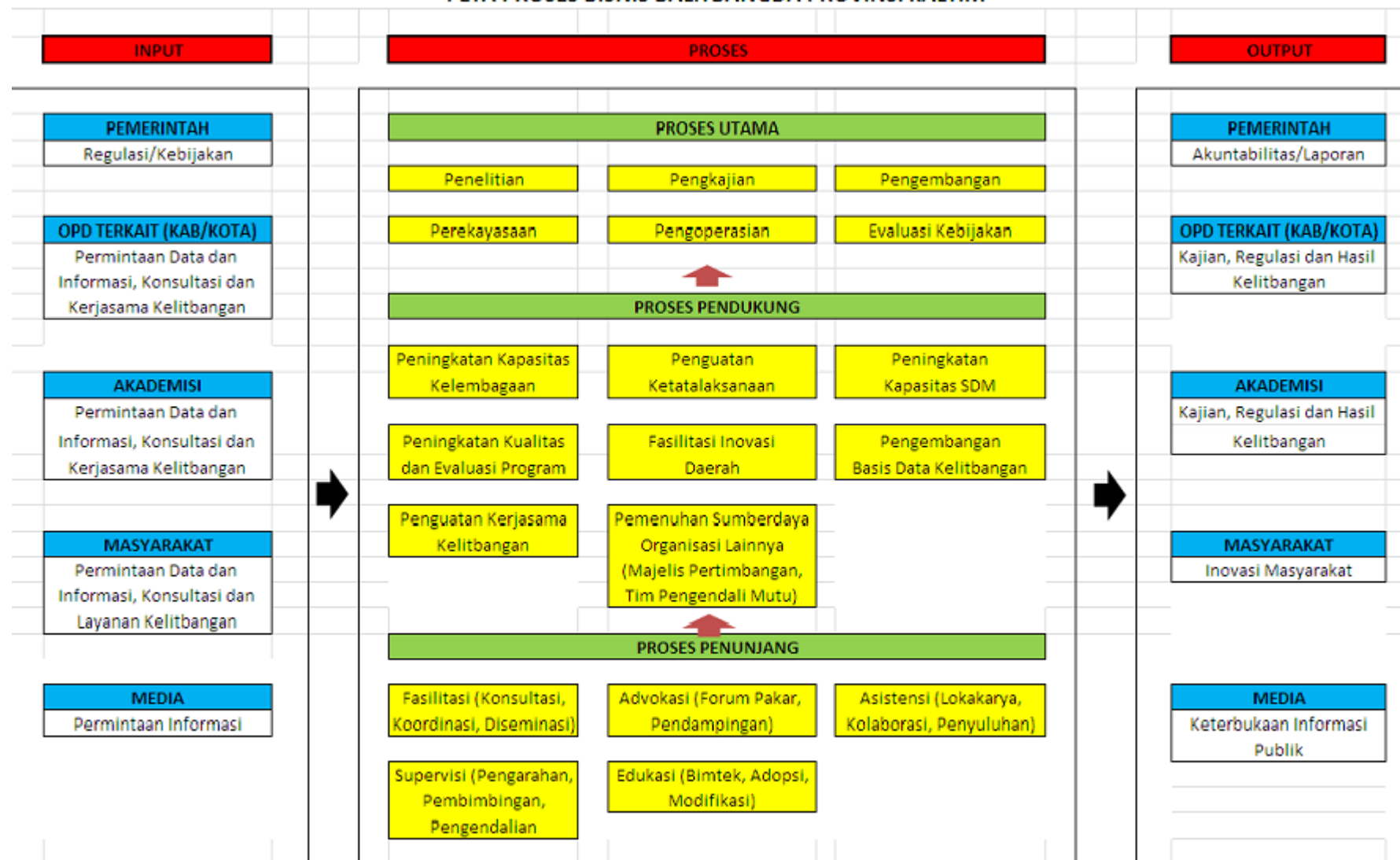


KETERANGAN

1	:	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Balitbangda sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Sekretariat.
2/3	:	Sekretaris meneruskan surat permohonan kepada Kepala Badan dan selanjutnya di disposisi ke Tim PPID Pembantu untuk ditindaklanjuti dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
4	:	Permohonan informasi/data disampaikan kepada Pemohon.



PETA PROSES BISNIS BALITBANGDA PROVINSI KALTIM



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ada 5 (lima) permasalahan utama yaitu: 1) rendahnya daya saing SDM Kaltim, 2) pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, 3) belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata, 4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan 5) belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan kelitbangan secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 3.1 dan 3.2 berikut :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan SKPD.	1. Pelaksanaan Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi.	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi SKPD. 2. Standar Pelayanan Publik (SPP)	1. Kualitas dan kuantitas SDM Peneliti masih rendah. 2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). 3. Kedudukan Balitbangda sangat strategis. 4. Komitmen pimpinan sangat kuat.	1. Tersedianya SDM Peneliti di luar Balitbangda. 2. Perkembangan Riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 3. Tersedianya dana dan lembaga litbang partnership. 4. Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah. 5. Persaingan di era globalisasi.	1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di SKPD. 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang. 3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak. 4. Terbatasnya jumlah peneliti yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan daerah.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				6. Persepsi stakeholder yang kurang responsif terhadap litbang.	5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, teknologi informasi, perpustakaan, dan lain-lain). 6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di kab/kota kecuali kab. Kukar. 7. Belum tersusunnya grand design dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) OPD Balitbangda Prov. Kaltim

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerjasama litbang dengan donatur internasional	1. Sistem Inovasi Nasional (SINAS).	1. Kinerja Inovasi Daerah (KID)	1. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten untuk temuan RISTEK di masyarakat perlu dijamin

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threats*), atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan **faktor internal** (kekuatan dan kelemahan), serta **faktor eksternal** (peluang dan ancaman) sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S1	Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	W1	Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
S2	Komitmen Pimpinan Kuat	W2	Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
S3	Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	W3	Lemahnya jejaring kerja
S4	Kualitas SDM Peneliti	W4	Belum adanya perda penelitian satu pintu
		W5	Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
		W6	Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
		W7	Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
		W8	Belum adanya rencana induk kelitbangan.
		W9	Belum adanya database peneliti.
		W10	Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
		W11	Tidak adanya respon dari OPD teknis terkait dalam pengajuan penelitian

		W12	Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
		W13	Belum memadainya pendanaan untuk kelitbangan
No	Peluang (Opportunity)	No	Ancaman (Threats)
O1	Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	T1	Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
O2	Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T2	Persaingan di Era Globalisasi
O3	Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	T3	Persepsi stakeholders yang kurang responsif
O4	Adanya peraturan tentang SIDA	T4	Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain
O5	Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	T5	Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah
O6	Adanya asosiasi peneliti di kaltim (Himperindo Kaltim)		

Adapun hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pada Balitbangda Provinsi Kaltim dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Internal
(Strength dan Weaknesses)

KEKUATAN (STRENGTH)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	5	$5 / 60 \times 100\% = 8 \%$
Komitmen Pimpinan Kuat	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	5	$5 / 60 \times 100\% = 8 \%$
Kualitas SDM Peneliti	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
KELEMAHAN (WEAKNESSES)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Kuantitas SDM Peneliti belum optimal	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$

Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Lemahnya jejaring kerja	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum adanya regulasi penelitian satu pintu	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum adanya rencana induk kelitbangan.	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Belum adanya database peneliti.	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Tidak adanya respon dari PD teknis terkait dalam pengajuan penelitian	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Jumlah	60	100 %

Sedangkan hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor eksternal (peluang dan ancaman) dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Eksternal
(Opportunity dan Threats)

PELUANG (OPPORTUNITY)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	$5 / 32 \times 100\% = 16 \%$

Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Adanya peraturan tentang SIDA	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	5	$5 / 32 \times 100\% = 16 \%$
Adanya asosiasi peneliti di kaltim	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
ANCAMAN (THREATS)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Persaingan di Era Globalisasi	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Persepsi stakeholders yang kurang responsif	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Jumlah	32	100 %

Tabel di atas menggambarkan bahwa faktor ancaman lebih kecil dibanding bobot pada faktor peluang. Ini berarti Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat mengembangkan peluang yang ada untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi ancaman. Setelah ditentukan Nilai Urgensi dan ditemukan Bobot Faktor, tahap selanjutnya adalah menentukan Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (NBD). Dalam konteks Balitbangda Kalimantan Timur, Nilai Dukungan dan Nilai Bobot Dukungannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Dukungan & Nilai Bobot Dukungan Faktor Lingkungan Internal & Eksternal Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Kekuatan (Strength)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	5	0,40
Komitmen Pimpinan Kuat	4	0,28
Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	5	0,40
Kualitas SDM Peneliti	4	0,28
		1,36

Kelemahan (Weaknesses)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Kuantitas SDM Peneliti belum optimal	3	0,15
Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang	4	0,28
Lemahnya jejaring kerja	3	0,15
Belum adanya regulasi penelitian satu pintu	4	0,28
Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.	3	0,15
Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	4	0,28
Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim	3	0,15
Belum adanya rencana induk kelitbangan.	4	0,28
Belum adanya database peneliti.	3	0,15
Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.	4	0,28
Tidak adanya respon dari PD teknis terkait dalam pengajuan penelitian	3	0,15
Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.	4	0,28
		2,58
Peluang (Opportunity)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	4	0,5
Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	0,8
Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	3	0,27
Adanya peraturan tentang SIDA	4	0,5
Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	5	0,8

Adanya asosiasi peneliti di kaltim	4	0,5
		3,37
Ancaman (Threats)	Nilai Dukungan (ND)	Nilai Bobot Dukungan (NBD)
Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	4	0,5
Persaingan di Era Globalisasi	3	0,27
Persepsi stakeholders yang kurang responsif	3	0,27
Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan PD lain	4	0,5
Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	3	0,27
		1,81

Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Balitbangda mempergunakan analisis SWOT sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategik, yaitu:

1. **Strategi Strength – Opportunities (SO)**, yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
2. **Strategi Strength – Threats (ST)**, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
3. **Strategi Weakness–Opportunity (WO)**, yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
4. **Strategi Weakness – Threats (WT)**, yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari analisis tersebut di atas maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) SKPD. Balitbangda Provinsi
Kalimantan Timur

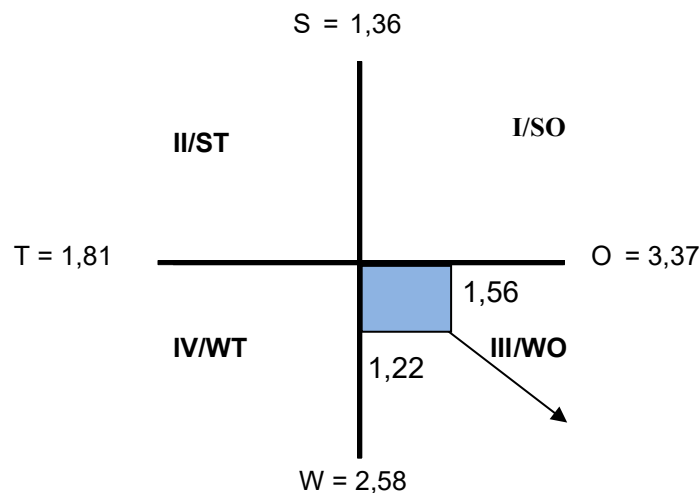
Urutan FKK	Faktor Internal		
	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S3	Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	W2	Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
S1	Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	W4	Belum adanya perda penelitian satu pintu
S2	Komitmen Pimpinan Kuat	W6	Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
S4	Kualitas SDM Peneliti	W8	Belum adanya rencana induk kelitbangan.
		W10	Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
		W12	Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
		W1	Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
		W3	Lemahnya jejaring kerja
		W5	Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
		W7	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
		W9	Belum adanya database peneliti.
		W11	Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian

Urutan FKK	Faktor Eksternal		
	Peluang (Opportunity)	No	Ancaman (Threats)
O5	Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	T1	Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
O2	Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T4	Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain
O1	Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	T2	Persaingan di Era Globalisasi
O4	Adanya peraturan tentang SIDA	T3	Persepsi stakeholders yang kurang responsif
O6	Adanya asosiasi peneliti di kaltim	T5	Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah
O3	Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership		

Sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari analisis SWOT untuk penentuan peta kekuatan organisasi adalah:

- S** : Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat, dan Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis
- W** : Ada 6 weaknes dengan bobot yang sama, diantaranya belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan litbang, kurangnya sarana penelitian dan belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
- O** : Adanya pemindahan IKN ke Kaltim, dan Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- T** : Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah dan adanya rekomendasi penelitian dari OPD lain.

Dapat dipetakan posisi kekuatan organisasi seperti gambar berikut :



Gambar 3.1. Peta Posisi Kekuatan Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim

Diagram peta posisi kekuatan berdasarkan analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa Balitbangda Prov. Kaltim berada pada kuadran III WO yaitu strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD, maka faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan litbang yang mempengaruhi permasalahan litbang adalah:

1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di OPD.
2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang.
3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak.
4. Terbatasnya jumlah peneliti dan bidang kepakarannya yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan provinsi.
5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain-lain).

6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim.
7. Belum tersusunnya *Grand Design* dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Yang menjadi pendorong guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah keberadaan Litbang dan IPTEK yang sangat strategis dan diperlukan dalam percepatan Otonomi Daerah terutama dalam mendorong pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah. Hal ini didukung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 pada pasal 20 (1) dan Pasal 21 (4) : Fungsi Pemda sebagai motivator, stimulator dan fasilitator dalam pembangunan IPTEK maka perlu dibentuk Balitbangda untuk melaksanakan tupoksi tersebut.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 digunakan sebagai momentum pengembangan litbang secara Nasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, kegiatan kelitbangan meliputi 2 kegiatan yaitu Kegiatan Utama yang terdiri 1). Penelitian, 2). Pengembangan, 3). Pengkajian, 4). Penerapan, 5). Perekayasaan, 6). Pengoperasian, dan 7). evaluasi kebijakan, dan kegiatan pendukung meliputi: 1). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2). Ketatalaksanaan, 3). Sumber Daya Manusia, 4). Sumberdaya organisasi lainnya.

3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu objek yang dapat digunakan dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan lptek yang hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ruang dan wilayah tersebut. Arah dari penelitian, pengembangan, dan penerapan lptek menjadi penting sebagai acuan dalam menetapkan peruntukkan ruang dan wilayah, sehingga peruntukkan ruang dan wilayah tersebut tidak semata-mata ditetapkan secara subjektif, namun ditetapkan secara objektif berdasarkan potensi dan kehandalan sumber daya yang dimiliki di masing-masing ruang atau wilayah.

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00'Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

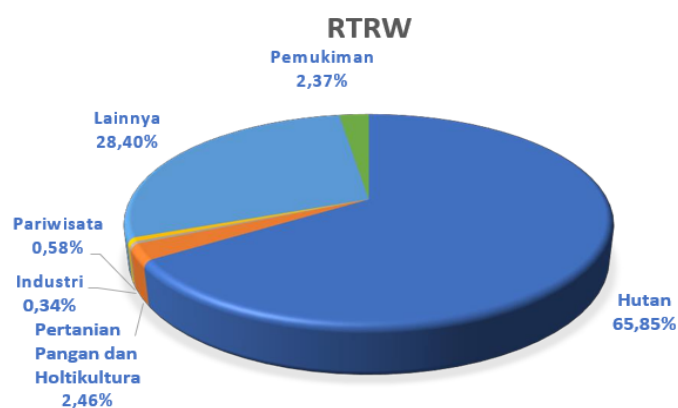
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur berstatus kawasan hutan dengan luasan mencapai 8.339.153 Ha (65,48%), sedangkan sisanya terbagi untuk kawasan industri seluas 57.176 Ha (0,45%), kawasan pariwisata darat seluas 97.442 Ha (0,77%), kawasan perikanan seluas 187.304 Ha (1,47%), kawasan perkebunan seluas 3.269.561 Ha (25,67%) kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), serta kawasan pertanian pangan, dan holtikultura sebesar 412.096 Ha (3,24%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 m sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 m sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 m sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-

1500 m) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Provinsi Kaltim 2016-2035

Gambar 3.2. Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.109.696	10	144
2	Kutai Barat	1.370.992	16	194
3	Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4	Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5	Kutai Timur	3.105.171	18	141
6	Berau	2.173.519	13	110

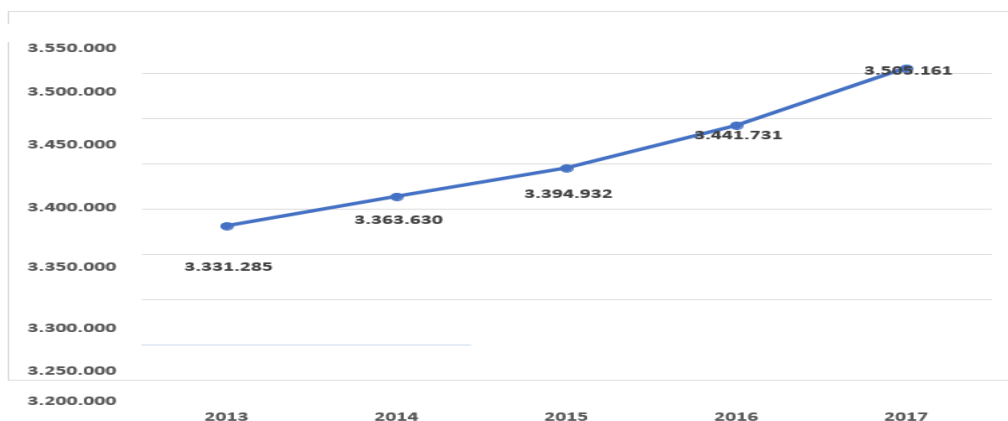
7	Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8	Balikpapan	51.225	6	34
9	Samarinda	71.653	10	59
10	Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur		12.734.692	103	1.038

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka tahun 2020

Tabel 3.9
Luas Wilayah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur 2017

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex ratio	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk (2014-2017) (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total			
1	Paser	133.192	122.456	255.648	108,77	23,04	1,59
2	Kutai Barat	84.066	75.934	160.000	110,71	11,67	0,61
3	Kutai Kartanegara	353.323	321.436	674.759	109,92	25,96	0,85
4	Kutai Timur	227.826	190.799	418.625	119,41	13,48	0,36
5	Berau	118.392	103.444	221.836	114,45	10,21	1,68
6	Penajam Paser Utara	87.562	80.450	168.012	108,84	57,46	1,58
7	Balikpapan	323.614	309.582	633.196	104,53	1.236,11	1,44
8	Samarinda	394.435	375.197	769.632	105,13	1.074,11	1,41
9	Bontang	92.066	84.449	176.515	109,02	1.081,98	2,26
10	Mahakam Ulu	14.276	12.662	26.938	112,75	1,39	2,60
Kalimantan Timur		1.828.752	1.676.409	3.505.161	109,09	27,52	1,04

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
Data Sex Ratio, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah data diolah



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3. Jumlah Penduduk Kalimantan Timur 2013-2017

Dengan memperhatikan kajian RT RW, pertumbuhan penduduk dan isu lingkungan hidup yang dihadapi provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan untuk menyediakan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk dasar kebijakan dalam RTRW dan mengangani isu lingkungan hidup.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maka ada beberapa isu sebagai berikut :

- 1) masih rendahnya daya saing SDM,
- 2) transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horisontal,
- 3) pengembangan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah,
- 4) penurunan kualitas lingkungan hidup, dan
- 5) pemerintah yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel.
- 6) Penetapan Kaltm sebagai Ibu Kota Negara yang baru
- 7) Perkembangan Peraturan Perundangan dengan terbitnya antara lain Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini ditambah lagi dengan masalah eksternal seperti pencapaian SDG's, komitmen pemberantasan korupsi, dan koordinasi yang lemah antara provinsi dan kab/kota dalam pengendalian izin eksploitasi SDA, sehingga isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebut perlu mendapat perhatian terkait dengan kegiatan litbang. Seiring dengan pergantian Kapala Balitbangda Prov. Kaltim pada tahun 2021, dan mempedomani isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Timur, maka disusunlah isu-isu strategis tersebut sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Optimal Hasil Kelitbangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 18 tentang penelitian dan pengembangan, disebutkan bahwa penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya. ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penelitian juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan. Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

2. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara.

Salah satu isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yakni tentang Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, serta Presiden menetapkan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, hal ini mendorong Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadikannya sebagai isu strategis dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Hal lain terkait isu strategis yang mendukung isu-isu strategis tersebut yakni Kesepakatan Bersama (MoU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Lembaga Litbang Kementerian/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian dan lain- lain telah dibuat yang perlu diperbaharui dan ditindaklanjuti secara kongkrit yaitu:

1. MoU dengan Badan Standarisasi Nasional tentang Pembinaan dan pengembangan Standardisasi di Kalimantan Timur.
2. MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Prov. Kaltim.
3. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

4. MoU dengan Lembaga Ketahanan Nasional tentang Kerjasama dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. MoU antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Universitas Mulawarman dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kaltim tentang Kerjasama Pembangunan Pusat Teknologi dan Informasi Kelapa Sawit.
6. MoU dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pengembangan Ekonomi dan Wilayah berbasis Sumber Daya Lokal .
7. MoU dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Akademi dan Profesional, Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
8. MoU dengan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian, Universitas Mulawarman tentang Kerjasama Pengembangan dan Penerapan hasil Litbang Teknologi Industri untuk mendukung Pembangunan Industri di Kalimantan Timur.
9. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. MoU dengan Badan Tenaga Atom Nasional.
11. MoU dengan berbagai Universitas negeri dan swasta lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan fokus kelitbangan kedepan terkait dengan IPTEK sebagaimana tertuang dalam kegiatan kelitbangan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4.1. Tujuan

Tujuan adalah misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Tujuan Perangkat Daerah (PD) harus sejalan dengan sasaran pemerintah daerah. Adapun sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang didukung oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yaitu sasaran ke-18 yang berbunyi **“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”**.

Sasaran tersebut kemudian menjadi pedoman untuk tujuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yakni **“Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien”**. Adapun penjabaran tujuan dimaksud, bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan yang efektif dan efisien atau tepat guna dan sesuai waktu/target dan meningkatkan kinerja Balitbangda. Terhususnya Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa Kelitbangan yang dihasilkan memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk ***Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur***, dan ***Mendukung Ibu Kota Negara***, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsih untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui rekomendasi kebijakan yang inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), meliputi permasalahan ekonomi, sosial dan pemerintahan dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Tujuan tersebut juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, bahwa rekomendasi kebijakan kelitbangan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),

4.2. Sasaran

Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yakni : **“Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan**



Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara”. Kata kunci dari sasaran tersebut merujuk pada isu strategis atau permasalahan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Ibu Kota Negara, yakni :

1. Kelitbangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan adalah hal utama yang mendukung disusunnya sasaran strategis Balitbangda Provinsi Kaltim, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 18 tentang penelitian dan pengembangan, disebutkan bahwa penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya. ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penelitian juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan. Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Hal mendasar lainnya seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yakni memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah, sehingga sejatinya kebijakan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah berdasarkan kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi.

2. Ibu Kota Negara

Isu strategis berikutnya adalah dukungan untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkannya indikator tersebut juga dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan dokumen

perencanaan adalah berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang di dalamnya telah mengakomodir keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah yang masuk administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) banyak permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam kegiatan litbang, seperti persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh. Selain aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal yang juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat masif. Jika diurutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas. Selanjutnya, secara implementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya lainnya. Hal mendasar inilah yang menjadi hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN menjadi sasaran strategis Balitbangda.

Indikator Kinerja Sasaran

Dalam perjalanannya mengalami dinamika perubahan kebijakan dan kepemimpinan, sehingga indikator sasaran mengalami beberapa perubahan. Adapun rangkaian perubahan indikator sasaran tersebut dimulai tahun 2019-2020, dan tahun 2021-2023, sesuai tabel 4.1 dan 4.2 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan
Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019-2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

No (1)	Tujuan (2)	Sasara (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
Misi 1: Menghasilkan rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah					
	“Terwujudnya Hasil Kelitbangan yang Berkualitas dan Inovatif untuk Mendukung Birokrasi yang Efektif dan Efisien”	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Program Litbang Bidang Sosial pemerintahan	Kegiatan Litbang Bidang Sosial Pemerintahan
				Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui Penguatan Inovasi Daerah					



No (1)	Tujuan (2)	Sasara (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
	Terwujudnya Hasil Kelitbangan yang Berkualitas dan Inovatif untuk Mendukung Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi
Misi 3 : Meningkatkan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur					
	Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase meningkatnya pelayanan PD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran



No (1)	Tujuan (2)	Sasara (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
			Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pemeliharaan dan peralatan sarana dan prasarana kantor Balitbangda Prov. Kaltim
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	Program penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran
					Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kerjasama kelitbang dengan akademisi, bisnis, pemerintahan dan komunitas (ABGC)					
	Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonsasi	Peningkatan kapsitas dan kerjasama antar lembaga kelitbang	Persentase meningkatnya kapasitas dan kerjasama kelembagaan Balitbangda,	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerinthan Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No (1)	Tujuan (2)	Sasara (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
	Kerjasama Antar Lembaga Litbang		SDM dan fasilitas pendukung.		Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
MISI 5 : Menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada para pihak					
	Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	1. Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> . 2. Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> .	1. Tersedianya <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah berbasis <i>web</i> yang berkualitas 2. Meningkatnya penyebaran hasil kelitbangan (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan Rakorda kelitbangan



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan
Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (2021)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan Mendukung IKN (2022-2023)			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Bidang Sosial dan Pemerintahan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Umum	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan	Bidang Sosial dan Pemerintahan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Kelembagaan Desa	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Penelitian dan Pengembangan Sosial Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Olahraga	
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang	Penelitian dan Pengembangan Koperasi,	Bidang Ekonomi dan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
				Ekonomi Dan Pembangunan	Usaha Kecil dan Menengah	Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan	Bidang Ekonomi dan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Sater Penanggung Jawab
					Perhubungan	Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bidang Inovasi dan Teknologi
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bidang Inovasi dan Teknologi
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bidang Inovasi dan Teknologi
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Bidang Inovasi dan Teknologi



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bidang Inovasi dan Teknologi
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
			Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (2021)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Bidang Inovasi dan Teknologi



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Teknologi dan Inovasi	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Tugas Balitbangda	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat
				Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat
				Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat
					Penyediaan Barang Cetak dan	Sekretariat



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Penggandaan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Sekretariat
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraDinas	Sekretariat



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Jabatan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat



Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019-2020
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	30%	30%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019
		Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	30%	30%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019
			Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah	30%	30%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung.	78 (BB)	79 (BB)	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019
			Persentase meningkatnya pelayanan PD	80%	85%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019
			Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	80%	90%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	78 (BB)	79 (BB)	Permendagri 90/2019	Permendagri	Permendagri
	Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonisasi Kerjasama antar lembaga litbang	Peningkatan kerjasama antar lembaga kelitbangan	Jumlah jejaring kerja (<i>networking</i>) kelitbangan dan inovasi daerah	4 Jejaring Kerja	5 Jejaring Kerja	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> .	Persentase tersedianya <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah berbasis <i>web</i> yang berkualitas	3 Media Informasi	3 Media Informasi	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019
		Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i>	Persentase meningkatnya penyebaran hasil kelitbangan (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)	80%	80%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, pada tahun 2021 disusunlah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2023 yang berorientasi pada hasil kelitbang, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Kinerja Balitbangda Dalam Menghasilkan Kelitbang untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara	Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang Menghasilkan Kelitbang untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase hasil kelitbang yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Indikator lama	26%	19%	27%	27%
		Meningkatnya Hasil Kelitbang yang Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Indikator lama	9%	18%	36%	36%

Dengan indikator sasaran yang hanya berorientasi hasil kelitbangan dianggap tidak dapat mengukur outcome/hasil kinerja Balitbangda, maka berdasarkan kebijakan Kepala Badan indikator kinerja sasaran mengalami perbaikan tolok ukur dari dihasilkan menjadi dimanfaatkan dengan target kinerja yang disusun berdasarkan tahun Renstra, seperti pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Kinerja Balitbangda Dalam Menghasilkan Kelitbangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara	Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang Menghasilkan Kelitbangan untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Indikator lama	Indikator lama	45%	72%	100%
		Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Mendukung Ibu Kota Negara.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.	Indikator lama	Indikator lama	27%	63%	100%

Kemudian dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, maka dilakukanlah Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan untuk mendukung perubahan tersebut Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi keselarasan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah termasuk Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Adapun hasil keselarasan tujuan, sasaran dan indikator tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2022, seperti tampak pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022-2023
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Persentasi Hasil <input type="checkbox"/> Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Indikator lama	Indikator lama	Indikator lama	72%	100%

Sumber : Hasil Verifikasi Keselarasan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut yakni :

**Tabel 4.7 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kaltim Tahun 2022-2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas	Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Persentase Hasil □ Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
						Persentase Hasil Kelitbangan yang Dihasilkan untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Dan Pembangunan	Ekonomi dan Pembangunan
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Tugas Balitbangda	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Tugas Balitbangda	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan publik pada tugas balitbangda	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu
							Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
								umum yang terlaksana
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana
							Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah

5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 4 (empat) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2019-2023, hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi Pertama : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi

Balitbangda Prov. Kalimantan Timur berkomitmen dan konsisten dalam melakukan kegiatan kelitbangan yang berkualitas dan didukung oleh SDM serta output yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023 serta perkembangan isu-isu aktual di daerah.
- Kebijakan kelitbangan 1 (satu) pintu dengan Balitbangda selaku koordinator kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Strategi Kedua : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN.



3. Strategi Ketiga : Mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi.

Optimalisasi pemberdayaan jejaring kerja dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga dan SDM guna menunjang dan mendukung pelaksanaan kelitbangan daerah. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran

- Meningkatkan Kerjasama antar lembaga kelitbangan.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornas.

4. Strategi Keempat : Mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Kaltim, SIRI KALTIM.

Optimalisasi pengelolaan pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Kaltim, SIRI KALTIM dibutuhkan sebagai dokumen internal Balitbangda Provinsi Kaltim dan pemenuhan ketentuan keterbukaan informasi publik. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Termanfaatkannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah oleh *stakeholder*.
- Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada *stakeholder*.

Sistem Informasi Riset dan Inovasi Kaltim, SIRI KALTIM, tersebut terdiri dari :

1. Inventarisasi kebutuhan riset dan inovasi
2. SDM riset dan inovasi (11 JF) serta Angka Kreditnya
3. Database riset , video dan hak cipta
4. Database inovasi, video
5. Database Invensi (Paten)

6. Fasilitas Riset dan Inovasi dengan fasilitas laboratorium air, udara, tanah, fisika dasar, kimia dasar
7. Kerjasama atau partnership
8. pemanfaatan
9. Penjaringan Peserta Inovasi Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN PEDDA).
10. Display Science Techno Park
11. Sentra Kekayaan Intelektual

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

**Tujuan, Strategi, Sasaran dan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**

Misi 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.			
Tujuan	Strategi	Sasaran	Kebijakan
Terwujudnya Hasil Kelitbangan yang Berkualitas dan Inovatif untuk Mendukung Birokrasi yang Efektif dan Efisien”(2019-2020)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi	Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah	Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023 serta perkembangan isu-isu aktual di daerah.
Meningkatkan Kinerja Balitbangda Dalam Menghasilkan Kelitbangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara (2021)			Kebijakan kelitbangan 1 (satu) pintu dengan Balitbangda selaku koordinator kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN
	Mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi.	Meningkatnya Kerjasama antar lembaga kelitbangan.	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornas
	Mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Kaltim, SIRI KALTIM	Termanfaatkannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah oleh <i>stakeholder</i> .	Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web
		Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> .	

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Balitbangda Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok.

1. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balitbangda.
2. Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Balitbangda sehari-hari pada seluruh bidang.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra PD dibutuhkan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Bidang pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2020

No	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah. Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten 	
S1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kelitbangan S2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem inovasi daerah (SIDa)			
	K: Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023, Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA), dan	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan
	K : Intergrasi SIDa dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.		
	K: Kebijakan Kelitbangan satu pintu.		
	K : Optimalisasi dan reviu roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai perubahan lingkungan strategis	Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial dan Budaya Yang Dilaksanakan

		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan
		Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan
		Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan
			Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan
		Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi
		Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan
			Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan
			Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Bidang pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023
Program Penelitian dan Pengembangan

No.	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi	Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023 serta perkembangan isu-isu aktual di daerah.	Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Kebijakan kelitbangan 1 (satu) pintu dengan Balitbangda selaku koordinator kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi.	Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023**

No.	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3.	Mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan), invensi dan inovasi.	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakomas	Meningkatnya Kerjasama antar lembaga kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.	Mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Kaltim, SIRI KALTIM	Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web	Termanfaatkannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah oleh <i>stakeholder</i> .	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi
			Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i>		



litbang.kaltimprov.go.id



balitbangdaprov.kaltim



Balitbangda Prov KT

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra PD program dan kegiatan manajerial dan perkantoran terhadap penyelenggaraan PD sehari-hari seluruh bidang dibutuhkan program dan kegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 6.3

**Rencana Program dan Kegiatan Manajerial dan Perkantoran
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020**

No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
	Sasaran :	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur - Meningkatnya kerjasama antar lembaga kelitbangan - Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder - Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder 	
S3 : Mengoptimalkan pengelolaan <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah S4 : mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja dan inovasi daerah S5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.			
	K : Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal
		Kegiatan pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan
			Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana
		Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan
	K : Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)
		kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023**

No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapanm Sarana Dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi
		Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja PD
		Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
		Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
	K : Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum	Program Peningkatan Kerjasama Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase terlaksananya Kerjasama Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah
		Kegiatan Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah	Jumlah Kegiatan Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah



Tabel 6.4

**Rencana Program dan Kegiatan Manajerial dan Perkantoran
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**

No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
S4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.			
	K : Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan publik pada tugas balitbangda
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan
		Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan an administarsi umum yang terlaksana
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun pendanaan indikatif tercantum pada tabel 6.4 sebagaimana berikut :



Tabel 6.4
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Dalam juta Rupiah)/ 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaain pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD	
								2019	2020	2021		2022		2023					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisian	Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang menghasilkan Kelitbangan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesjahteraan masyarakat				Permendagri 13 Tahun 2006	45%	3,076,665,000					45%	3,076,665,000			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian					100%	867.075.500									

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

				Peraturan														
					Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg araan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg araan Otonomi Daerah			1 laporan	83,100,000					1 laporan	83,100,000	Bidang Sosial dan Pemerint ahan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Pemerintah an Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Pemerintah an Umum			1 laporan	118,250,000					1 laporan	118,250,000	Bidang Sosial dan Pemerint ahan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Kelembaga	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban			1 laporan	95,900,000					1 laporan	95,900,000	Bidang Sosial dan Pemerint ahan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					an dan Ketatalaksa naan	gan Bidang Kelembaga an dan Ketatalaksa naan													
					Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			2 laporan	177,900,000				2 laporan	177,900,000	Bidang Sosial dan Pemerint ahan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m		
					Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1 laporan	391,925,500				1 laporan	391,925,500	Bidang Sosial dan Pemerint ahan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m		
			Penelitian dan Pengemban gan Bidang Sosial dan Kependudu kan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengemban gan Bidang Sosial dan					100%	36.600.000									



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

				Kependudu kan																
					Penelitian dan Pengemban gan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban gan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak			1 laporan	36,600,000						1 laporan	36,600,000	Bidang Sosial dan Pemerint ahan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m	
			Penelitian dan Pengemban gan Bidang Ekonomi Dan Pembangun an	Persentase Hasil Penelitan dan Pengemban gan Ekonomi dan Permbangu nan					100%	1.196.374.500						100%	1.196.374.500			
					Penelitian dan Pengemban gan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban gan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Penelitian dan Pengemban gan Perindustria	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban													Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Kab./ Kota & Prov. Kalti



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					n dan Perdaganga n	gan Perindustria n dan Perdaganga n												m
					Penelitian dan Pengemban gan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban gan Badan Usaha Milik Daerah											Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Penelitian dan Pengemban gan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban gan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 laporan	280,090,000					1 laporan	280,090,000		Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Penelitian dan Pengemban gan Energi dan Sumberday a Mineral	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban gan Energi dan Sumberday a Mineral		1 laporan	279,100,000					1 laporan	279,100,000		Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Penelitian dan Pengemban gan Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengemban gan Pekerjaan Umum		2 laporan	637,184,500					2 laporan	637,184,500		Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Kab./ Kota & Prov. Kalti m



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi					100%	940.615.000								
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi											Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah rancang bangun yang diuji cobakan			1 RB	158,250,000				1 RB	158,250,000		Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim			12 inovasi	398,900,000				12 inovasi	398,900,000		Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Sosialisasi dan	Rakor Kelitbagan			1 laporan	147,715,000				2 laporan	324,973,000		Bidang Inovasi	Kab./ Kota



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													dan Teknologi	& Prov. Kaltim
						Jumlah hasil kelitbangan yang di Diseminasi kan			25 hasil	120,750,000					25 hasil	120,750,000		Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
						Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan			20 artikel	115,000,000					20 artikel	115,000,000		Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang difasilitasi			1 HKI	36,000,000					1 HKI	36,000,000		Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)					27%	430,000,000					27%	430,000,000			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					100%	226.500.000									



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1 laporan	226,500,000					2 laporan	306,300,000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi					100%	203,500,000								
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	0%		1 laporan	203,500,000					1 laporan	203,500,000	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Tugas Balitbangda	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan publik pada tugas Balitbangda					95%	16,052,227,000					95%	16,052,227,000		



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu					31 dokumen	78,950,000					31 dokumen	78,950,000	Balitbangda	Samarinda
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan			21 dokumen	34,400,000					21 dokumen	34,400,000	Balitbangda	Samarinda
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	44,550,000					10 Dokumen	44,550,000	Balitbangda	Samarinda
			Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu					14 dokumen	11,038,257,632								



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan			14 Dokumen	11,038,257,632					14 Dokumen	11,038,257,632	Balitbangda	Samarinda
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu					10 dokumen	35.000.000					10 dokumen	35.000.000		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			10 orang	35,000,000					10 orang	35,000,000	Balitbangda	Samarinda
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana					12 bulan	2,507,343,193					12 bulan	2,507,343,193	Balitbangda	Samarinda
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan			12 dokumen	81,275,568					12 dokumen	81,275,568	Balitbangda	Samarinda



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/pener angan bangunan yang diadakan			27 jenis	19,090,395						27 jenis	19,090,395	Balitbang da	Sam arind a
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor yang diadakan			8 unit	14,007,200						8 unit	14,007,200	Balitbang da	Sam arind a
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan			27 Jenis	39,999,925						27 Jenis	39,999,925	Balitbang da	Sam arind a
					Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi			12 laporan	2,352,970,105						12 laporan	2,352,970,105	Balitbang da	Luar Prov Kalti m
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana					56 unit	310,452,500						56 unit	310,452,500	Balitbang da	Sam arind a
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah peralatan dan perlengkap			3 unit	49,800,000						3 unit	49,800,000	Balitbang da	



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	an kantor yang diadakan													
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan			16 unit	186,652,500					16 unit	186,652,500	Balitbang da	Sam arind a	
					Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang diadakan			37 unit	74,000,000					37 unit	74,000,000	Balitbang da	Sam arind a	
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana					12 bulan	1,731,085,675					12 bulan	1,731,085,675	Balitbang da	Sam arind a	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan			100 surat	7,500,000					100 surat	7,500,000	Balitbang da		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji non ASN			13 laporan	1,417,354,750					13 laporan	1,417,354,750	Balitbang da	Sam arind a	



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , air dan listrik			12 laporan	306,230,925					12 laporan	306,230,925	Balitbang da	Sam arinda
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah					5 kegiatan	351,138,000					5 kegiatan	351,138,000	Balitbang da	Sam arinda
					penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara			1 unit	29,550,000					1 unit	29,550,000	Balitbang da	Sam arinda
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional			25 unit	88,350,000					25 unit	88,350,000	Balitbang da	Sam arinda



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara		2 unit	154,488,000					2 unit	154,488,000	Balitbangda	Samarinda
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		52 unit	35,000,000					52 unit	35,000,000	Balitbangda	Samarinda
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-					-	-	Balitbangda	Samarinda
					pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 unit	43,750,000					1 unit	43,750,000	Balitbangda	Samarinda
									19,558,892,000						19,558,892,000		



Tabel 6.5
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Dalam juta Rupiah)/ 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaain pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD	
								2019	2020	2021		2022		2023					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisian	Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Persentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesjahteraan masyarakat				Permendagri 13 Tahun 2006			72%	1,420,200,000			72%	1,420,200,000			

\			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						100%	340.400.000						
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 laporan	79,800,000			1 laporan	79,800,000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 laporan	40,850,000			1 laporan	40,850,000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan	Jumlah laporan Fasilitasi,				1 laporan	69,250,000			1 laporan	69,250,000	Bidang Sosial dan	Kab./ Kota &

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan											Pemerintahan	Prov. Kaltim
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 laporan	79,800,000			2 laporan	79,800,000		Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 laporan	70,700,000			1 laporan	70,700,000		Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						100%	79.800.000						
					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 laporan	79,800,000			1 laporan	79.800.000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan						100%	500.000.000						
					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 laporan	170,006,300			1 laporan	170,006,300	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 laporan	165,070,000			1 laporan	165,070,000	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 laporan	164,923,700			1 laporan	164,923,700	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	.Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi						100%	500.000.000						
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					34	34			3 laporan	500,000,000	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Uji Coba dan Penerapan Rancang	Jumlah rancang bangun yang diuji										Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Bangun/Mo del Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	cobakan												i	Kalti m
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim												Bidang Inovasi dan Teknolog i	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbanga n	Rakor Kelitbagan												Bidang Inovasi dan Teknolog i	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
						Jumlah hasil kelitbangan yang di Diseminasi kan												Bidang Inovasi dan Teknolog i	Kab./ Kota & Prov. Kalti m
						Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan												Bidang Inovasi dan Teknolog i	Kab./ Kota & Prov. Kalti m



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang difasilitasi												Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dihasilkan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)						63%	79.800.000			63%	79.800.000				
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan/IKN	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						100%	79.800.000								
					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 laporan	79,800,000			1 laporan	79,800,000			Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Tugas Balitbangda	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan publik pada tugas Balitbangda						97%	17,500,000,000			97%	17,500,000,000		
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu						31 dokumen	42,800,000			31 dokumen	42,800,000	Balitbangda	Samarinda
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan				21 dokumen	30,250,000			21 dokumen	30,250,000	Balitbangda	Samarinda
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 dokumen	12,550,000			10 dokumen	12,550,000	Balitbangda	Samarinda

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Administra si Keuangan	Jumlah Dokumen adminstras i keuangan yang diselesaika n tepat waktu						14 Dokumen	12,121,189,430							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan				14 Dokumen	12,121,189,430			42 Dokumen	23,159,447,062	Balitbang da	Sam arind a	
			Kegiatan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen adminstras i kepegawaia n yang diselesaika n tepat waktu														
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal								37 orang	35,000,000	Balitbang da	Sam arind a	
			Kegiatan Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan adminstras i umum yang terlaksana						12 bulan	2,462,249,429			24 bulan	4,969,592,622	Balitbang da	Sam arind a	



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 dokumen	174,730,209				12 dokumen	256,005,777	Balitbang da	Sam arinda
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan									27 jenis	19,090,395	Balitbang da	Sam arinda
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan									8 unit	14,007,200	Balitbang da	Sam arinda
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan				12 jenis	109,519,220				30 jenis	149,519,145	Balitbang da	Sam arinda
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi				12 laporan	2,178,000,000				24 laporan	4,530,970,105	Balitbang da	Luar Prov Kaltim



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana						unit	-				56 unit	310,452,500	Balitbang da	Sam arinda
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan									3 unit	49,800,000	Balitbang da	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan									16 unit	186,652,500	Balitbang da	Sam arinda
					Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang diadakan									37 unit	74,000,000	Balitbang da	Sam arinda
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana						12 bulan	2,416,737,041				24 bulan	4,147,822,716	Balitbang da	Sam arinda



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksana n				100	10,000,000			364 surat	17,500,000	Balitbang da	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji non ASN				13 laporan	2,166,240,936			13 laporan	3,583,595,686	Balitbang da	Sam arind a
					Penyediaan Jasa Komunikas i Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , air dan listrik				12 laporan	240,496,105			24 laporan	546,727,030	Balitbang da	Sam arind a
			Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah kegiatan pemelihara an sarana dan prasarana milik daerah						5 kegiatan	457,024,100			10 kegiatan	808,162,100	Balitbang da	Sam arind a
					penyediaan jasa pemelihara an, biaya pemelihara an dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara								1 unit	29,550,000	Balitbang da	Sam arind a



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional				27 unit	131,064,100			82 unit	219,414,100	Balitbangda	Samarinda
					pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara				2 unit	170,000,000			2 unit	324,488,000	Balitbangda	Samarinda
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara								52 unit	35,000,000	Balitbangda	Samarinda
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/				1 unit	91,000,000			1 unit	91,000,000	Balitbangda	Samarinda



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

						Direhabilitasi												
					pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 unit	64,960,000			1 unit	108,710,000	Balitbangda	Samarinda	
										0	19,000,000,000				38,558,892,000			

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Tabel 6.6																	
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Dalam juta Rupiah)/ PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (2023)																	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
								-2019		-2020		-2021		-2022		-2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kinerja Kelitbang yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Persentase Hasil Kelitbang yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbang yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat				Permendagri 13 Tahun 2006		Permendagri 13 Tahun 2006		Indikator sebelum di update		72%		100%	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							100%	665.194.000	100%	665.194.000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan					1 laporan	128.867.000	1 laporan	128.867.000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi					1 laporan	75,000,000	1 laporan	75,000,000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim



					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi					2 laporan	286.327.000	2 laporan	286.327.000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Pengelolaan Data Kelitbang an dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbang an dan Peraturan yang Dikelola					1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							100%	334.810.000	100%	334.810.000		

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1 dokumen	170.904.500	1 dokumen	170.904.500	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						1 dokumen	163.905.500		163.905.500	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan								100%	25,000,000	100%	25,000,000		



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral						1 dokum en	25,000,000	1 dokum en	25,000,000	Bidang Ekonom i dan Pemban gunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
			Pengem bangan Inovasi dan Teknolo gi	Persentase Pengemba ngan Inovasi dan Teknologi								100%	1,380,640,0000	100%	1,380,640,0000		
					Penelitian, Pengemba ngan, dan Perekayas aan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian. Pengemba ngan. dan Perekayas aan di Bidang Teknologi dan Inovasi						2 dokum en	587,123,000	2 lapora n	587,123,000	Bidang Inovasi dan Tekonol ogi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					1 laporan	149.979.000	1 laporan	149.979.000	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat					1 laporan	293.580.000	1 laporan	293.580.000	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim



						Inovatif											
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang an	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang an (rakor kelitbangan, diseminasi kelitbangan, jurnal)						3 laporan	249.978.000	3 laporan	249.978.000	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual"						1 laporan	99.980.000	1 laporan	99.980.000	Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./ Kota & Prov. Kaltim

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbang an yang Dihasilka n untuk Mendukn g Ibu Kota Negara							100%	717,150,031		717,150,031		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan							100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah					1 dokum en	250,000,000	1 dokum en	250,000,000	Bidang Ekonom i dan Pemban gunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian					1 dokum en	200,000,000	1 dokum en	200,000,000	Bidang Ekonom i dan Pemban	Kab./ Kota & Prov.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Perindustrian dan Perdagangan	dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan										gunan	Kaltim
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan					1 dokum en	350,000,000	1 dokum en	350,000,000		Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					1 dokum en	200,000,000	1 dokum en	200,000,000		Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim
					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan					1 dokum en	200,000,000	1 dokum en	200,000,000		Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab./ Kota & Prov. Kaltim



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

						Pertanahan												
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Tugas Balitbangda	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan publik pada tugas balitbangda									98%	16,121,375,000		16,121,375,000	Samarinda	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu									31 dokumen	130,250,000	31 dokumen	130,250,000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Samarinda
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10 dokumen	41,350,000	10 dokumen	41,350,000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Samarinda

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD					21 laporan	88,900,000	21 dokumen	88,900,000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Samarinda
			Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu							14 Dokumen	10,352,255,260	14 Dokumen	10,352,255,260		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan					45 Orang/Bulan	10,352,255,260	45 Orang/Bulan	10,352,255,260	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	Samarinda



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

						ASN													
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu										20 dokumen	64,600,000	20 dokumen	64,600,000		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pel.								20 orang	64.600,000	20 orang	64.600,000	Sub Bagian Umum	Samarinda
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana										12 bulan	2,470,647,000	12 bulan	2,470,647,000	Sub Bagian Umum	Samarinda
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda	Jumlah Paket Barang Cetak dan								1 paket	180.592.000	1 paket	180.592.000	Sub Bagian Umum	Samarinda



					aan	Penggand aan yang Disediaka n										
					Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n					1 paket	28,108,000	1 paket	28,108,000	Sub Bagian Umum	Samar inda
					Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n					1 paket	274,650,000	1 paket	274,650,000	Sub Bagian Umum	Samar inda
					Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n					1 paket	51,752,000	1 paket	51,752,000	Sub Bagian Umum	Samar inda

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD					12 lapora n	1,935,545,000	12 lapora n	1,935,545,000	Sub Bagian Umum	Luar dan dalam Prov Kaltim
			Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Jumlah unit pengadaa n belanja modal untuk sarana dan prasarana							58 unit	469,362,000	58 unit	469,362,000	Sub Bagian Umum	Samar inda
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n					31 unit	339,022,000	31 unit	339,022,000	Sub Bagian Umum	Samar inda

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					6 unit	61,020,000	6 unit	61,020,000	Sub Bagian Umum	Samarinda
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 paket	69,320,000	1 paket	69,320,000	Sub Bagian Umum	Samarinda
					Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					29 Unit	333,872,000	29 Unit	333,872,000	Sub Bagian Umum	Samarinda
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana							12 bulan	2.051,891,540	12 bulan	2.051,891,540	Sub Bagian Umum	Samarinda



					Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat					12 lapora n	20,000,000	12 lapora n	20,000,000	Sub Bagian Umum	Samar inda
					Penyediaa n Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n					12 lapora n	266,191,604	12 lapora n	266,191,604	Sub Bagian Umum	Samar inda
					Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n					13 lapora n	1,765,699,936	13 lapora n	1,765,699,936	Sub Bagian Umum	Samar inda
			Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin	Jumlah kegiatan pemeliha ran sarana dan prasnana milik daerah							5 kegiat an	582,369,200	5 kegiat an	582,369,200	Sub Bagian Umum	Samar inda

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

			tahan Daerah													
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 unit	198,139,200	6 unit	198,139,200	Sub Bagian Umum	Samarinda
					pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	199,650,000	2 Unit	199,650,000	Sub Bagian Umum	Samarinda
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					75 unit	35,020,000	75 unit	35,020,000	Sub Bagian Umum	Samarinda



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

					atau bangunan lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili- tasi										
					Pemeliha- aan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili- tasi					1 Unit	98,800,000	1 Unit	98,800,000	Sub Bagian Umum	Samar inda
					pemeliha- aan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					62 unit	50,760,000	62 unit	50,760,000	Sub Bagian Umum	Samar inda
													19,727,019,000		19,727,019,000	



Di dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan *refocusing* tujuan dan sasaran pembangunan. Perubahan jumlah tujuan dari yang semula 7 tujuan menjadi 6 tujuan. Selanjutnya perubahan sasaran dari yang semula 28 sasaran menjadi 19 sasaran. Perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian terhadap indikator yang digunakan. Adapun daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023

No.	Tujuan	Sasaran
Misi 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas		
	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing, Berkarakter Dan Berakhlak Mulia	Sasaran 1 : Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Sasaran 3 : Meningkatnya Pemerataan Ketahanan Kesehatan Masyarakat
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Sasaran 6: Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
Misi 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan		
	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sasaran 7 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pendapatan Daerah (Miliar Rp) Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas Dan Batubara Nilai Ekspor Komoditas Non Migas Dan Batubara (Miliar US\$) Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (Dalam Arti Luas) Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Pertanian Tanaman Sasaran 11: Meningkatnya Realisasi

		<p>Investasi Sektor Non Migas Dan Non Batu Bara Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)</p> <p>Sasaran 12 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Kontribusi Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%)</p> <p>Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)</p>
Misi 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
	<p>Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Sasaran 15 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Persentase Penurunan Emisi Dari BAU (%)</p> <p>Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana Indeks Risiko Bencana</p>
Misi 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
	<p>Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda</p>

Indikator kinerja Balitbangda secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam perjalanannya indikator kinerja sasaran Balitbangda Prov. Kaltim mengalami beberapa perubahan, seperti tampak pada tabel-tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2020

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	0%	30%	30%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	60%
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	0 %	30%	30%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	60%
3	Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Di Daerah	0%	30%	30%	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	Permendagri 90/2019	60%

Indikator tersebut berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan bulan juni tahun 2020, kemudian mengalami perbaikan tolok ukur dan target sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan kebijakan kepemimpinan Kepala Badan terpilih, yang tampak pada tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2020-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	0%	Indikator lama	26%	19%	27%	27%	
2	Persentase hasil kelitbangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	0%	Indikator lama	9%	18%	36%	36%	

Indikator kinerja utama tersebut terkonsentrasi pada menghasilkan kelitbangan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Ibu Kota Negara.

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Tahun 2021 dan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020, indikator kinerja utama tahun 2021 kembali mengalami perubahan tolok ukur dari dihasilkan menjadi dimanfaatkan dan perbaikan kinerja yang disusun berdasarkan tahun Renstra.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	0%	Indikator lama	Indikator lama	45%	72%	100%	100%
2	Persentase hasil kelitbangan yang memanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN	0 %	Indikator lama	Indikator lama	27%	63%	100%	100%

Dalam rangka Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan RENSTRA Balitbangda Provinsi Kaltim, telah dilakukan keselarasan tujuan dan keselarasan antara tujuan dan sasaran, sehingga untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut, indikator kinerja utama tahun 2022 mengalami perubahan.

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2022-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	0%	Indikator lama	Indikator lama	Indikator lama	72%	100%	100%

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pasal 66 Ayat (2) yang berbunyi pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan untuk mendukung tugas BRIDA yakni : menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi, maka untuk mendukung percepatan menjadi BRIDA, diperlukan pemetaan pencapaian kinerja sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Pemetaan tersebut diukur melalui kebermanfaatan dari kinerja program penelitian dan pengembangan daerah yang telah dilaksanakan dan kemudian diuraikan menjadi dua bagian yakni :sebagai berikut

1. Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap)
 - Hasil rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder
 - Hasil kelitbangan menjadi bahan penyusunan karya tulis ilmiah
 - Tindaklanjut hasil kelitbangan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama
 - Kunjungan Bappelitbang/Balitbangda Kab/Kota dan Perangkat Daerah ke Balitbangda Prov. Kaltim dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan, yang ditindaklanjuti oleh Bappelitbang/Balitbangda Kab/Kota dan Perangkat Daerah
 - Kunjungan Balitbangda Prov. Kaltim ke Bappelitbang/Balitbangda Kab/Kota dan Perangkat Daerah dalam dan luar wilayah Provinsi Kaltim dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan, yang ditanggapi oleh

Bappelitbang/Balitbangda Kab/Kota dan Perangkat Daerah dalam dan luar wilayah Provinsi Kaltim.

- Policy Brief

2. Inovasi dan inovasi

- HKI di Provinsi Kaltim
- Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN PEDATA) Telaah staf terhadap hasil kelitbangan
- Pemberian Penghargaan oleh Gubernur Kaltim Kepada PD Terbaik di Lingkungan Pemprov Kaltim
- Pemberian Penghargaan oleh Gubernur Kaltim Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Kaltim (Anugerah Panji-Panji Keberhasilan dan Tokoh Berjasa Tahun 2021)
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
- Sistem Informasi dan Teknologi
- Science Techno Park

Adapun perhitungan indikator tersebut yakni :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Ibu Kota Negara

Jumlah kelitbangan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Ibu Kota Negara yang dimanfaatkan, pada periode renja tahun berjalan X100%

Jumlah kelitbangan mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Ibu Kota Negara yang dihasilkan hingga akhir periode renstra

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PERUBAHAN
RENSTRA
TAHUN
2019-2023

Adapun penjelasan perhitungan capaian kinerja sasaran tersebut lebih terinci diuraikan dalam matrik berikut

TARGET									REALISASI						PENJELASAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN		2019	2020	2021	2022		2023		2020	2021	2022		2023		
Persentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	Jumlah kelitbangan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Ibu Kota Negara yang dimanfaatkan, pada periode renja tahun berjalan/Jumlah kelitbangan mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Ibu Kota Negara yang dihasilkan hingga akhir periode renstra	Indikator Lama	Indikator Lama	Indikator Lama	71/99	72%	99/99	100%			78/99	79%			1. Realisasi kinerja 79% (78/99x100%), melebihi target 72% (71/99)x100%, karena dari target renstra 71 riset/kajian, yang dimanfaatkan sejumlah 78 riset/kajian
					71 = 64+7		99 = 71+28				78 = 64+14				2. Angka71 diperoleh dari : 71=64+7, yang merupakan target jumlah riset/kajian tentang pembangunan dan kesra dan mendukung IKN dalam Renstra yang akan dimanfaatkan, dan merupakan akumulasi dari tahun 2020-2023
															3. Angka 99 merupakan judul riset/kajian terkait pembangunan dan kesra dan mendukung IKN dari tahun 2020-2023 sesuai nomenclatur dari (Permendagri 90 th 2019 ttg klasifikasi, kodefikasi dan nomenclatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah)
															4. Perhitungan target realisasi kinerja menggunakan analisa kumulatif agar memudahkan dalam mengevaluasi tahun sebelumnya



litbang.kaltimprov.go.id



balitbangdaprov.kaltim



Balitbangda Prov KT



Perubahan Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini merupakan penyempurnaan dan penajaman target yang akan dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra ini akan memerlukan komitmen, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara para pihak agar seluruh sumber daya yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk dapat melaksanakan Perubahan Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Seluruh insan Balitbangda berdasarkan hirarki kewenangan dan tupoksinya senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur terkait fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
2. Membuat Rencana Kerja (Renja) tahunan, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mengevaluasi capaian kinerja Renstra, khususnya terkait tindaklanjut kelitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada tahun Renstra.
4. Mensosialisasikan Perubahan Renstra ini kepada seluruh pegawai dan para pihak terkait kelitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tiap tahunnya hingga akhir periode RPJMD di tahun 2023.

Samarinda, Juli 2022
Plt. Kepala
Sekretaris,



Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197311272006041009